



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dengan bergulirnya era reformasi membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini untuk berubah menjadi lebih baik dengan mengakomodasi praktek-praktek pemerintahan yang baik atau lazim disebut "good governance" dan mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat di segala bidang pemerintahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2020 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2020. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran selalu ada permasalahan-permasalahan atau beberapa kekurangan-kekurangan di dalam pencapaian kinerja yang menggambarkan kurang fokusnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2020. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan kurnia-Nya kepada kita semua, Amin.

Blitar, Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

SAD SASMINTARTI, SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660119 198602 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	7
C. Maksud dan Tujuan	12
D. Dasar Hukum	13
E. Aspek-Aspek Strategis	15
F. Isu-Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	28
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020	
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 – 2020	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	35
1. Alokasi per Sasaran Pembangunan	
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
C. Prestasi/Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	
B. Langkah Perbaikan	

Lampiran

1. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpijak pada aturan dan tatanan dapat dibuktikan dengan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mengemban aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN. Upaya tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip

penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk suatu laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian

kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;
5. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kota;
8. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
9. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;

10. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
11. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
12. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kota;
13. mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
14. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;
15. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
16. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
19. pengelolaan pengaduan masyarakat;
20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
21. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; dan
22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar, terdiri dari Sekretaris dan 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan UM.

1). Sekretaris

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

2). Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :

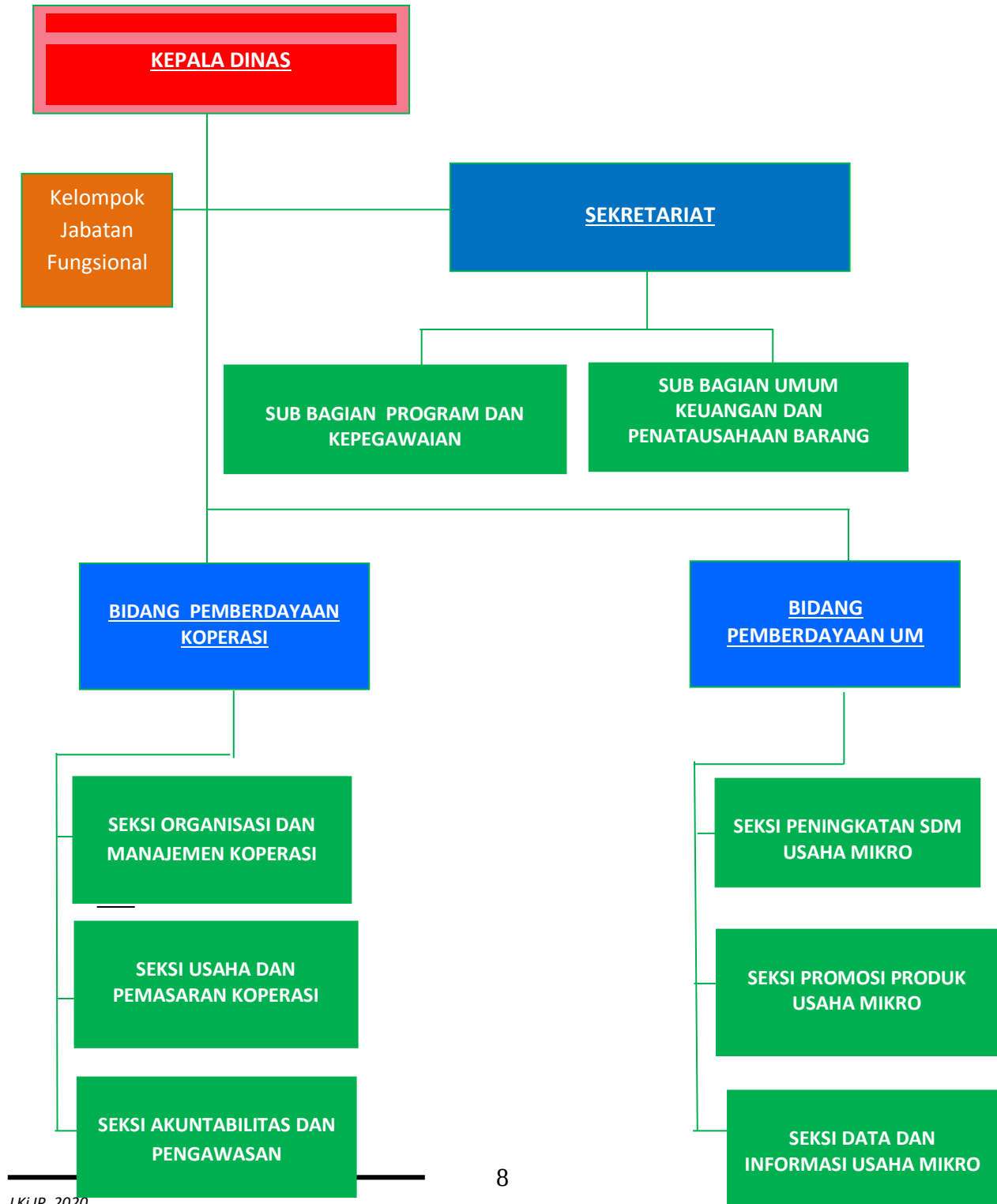
1. Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi
2. Seksi Usaha dan Pemasaran Koperasi
3. Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan

3). Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari 3 seksi, yaitu :

1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro
2. Seksi Promosi Produk Usaha Mikro
3. Seksi Data dan Informasi Usaha Mikro

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR**



Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, didukung oleh 20 (dua puluh) personil. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	13
2.	PEREMPUAN	7
JUMLAH		20

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jabatan

NO.	PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
		II	III	IV		
2.	S-2	-	1	-	-	1
3.	S-1	-	2	5	1	8
4.	D3	-	-	-	-	-
5.	SLTA	-	-	2	9	11
6.	SLTP	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	3	7	10	20

Berdasarkan Eselon

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH
	STRUKTURAL JABATAN	
1.	ESELON II	-
2.	ESELON III	3
3.	ESELON IV	7
4.	JABATAN FUNGSIONAL	-
5.	STAF	10
JUMLAH		20

Berdasarkan Golongan / Pangkat

NO	GOL.	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	IV	1	2	-	-	3
2.	III	1	1	-	7	9
3.	II	1	-	4	3	8
4.	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						20

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	Jabatan	JUMLAH
1.	Struktural	10 orang
2.	Non Struktural	10 orang
JUMLAH		20 orang

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan pelaksanaan tugas selama tahun 2020. Laporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar yang terinci dan penataan waktunya diperlukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada :

1. Maksud

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance
- b. Memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja.
- c. Evaluasi Kinerja dan sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja
- d. Sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan dan sebagai bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar atas penggunaan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
- b. Memberikan feedback untuk meningkatkan Mutu Pelaksanaan Pengelolaan Aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik,
- c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja organisasi,
- d. Memberikan Informasi yang lebih memadai dalam menunjang Proses Pengambilan Keputusan,
- e. Meningkatkan Pemanfaatan Alokasi Sumber Daya yang tersedia,
- f. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan organisasi dan mengarahkan pada Sasaran dan Tujuan organisasi.
- g. Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi, menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana, menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders serta menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- h. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar untuk meningkatkan kinerja.

D. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
12. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2020 tentang P-APBD Kota Blitar Tahun 2020
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 2016-2021
15. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran P-APBD Kota Blitar Tahun 2020

E. Aspek-Aspek Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Blitar untuk mengemban tugas pokok dan fungsinya mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016.
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas kinerja cukup memadai.
- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

b. Kelemahan

- Masih terbatasnya tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang kompeten untuk melakukan pembinaan .
- Masih kurangnya SDM yang menguasai IT.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan pelayanan.
- Terjalannya kerjasama yang baik dengan Lembaga dan Kementrian terkait.

b. Kendala

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergabung di lembaga koperasi dan usaha mikro
- Adanya intimidasi dari golongan masyarakat pelaku ijon/rentenir

F. Isu-Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Daya saing koperasi dan Usaha mikro masih terbatas di tingkat local
2. Hasil produksi Usaha Mikro tinggi tetapi masih belum berdaya saing

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) : Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD.

RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2016-2021, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2016-2021 tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Keterkaitan RPJMD Kota Blitar dengan Perubahan RENSTRA DINKOP & UM	
RPJMD TAHUN 2016 - 2021	PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016 – 2021
VISI : MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021	Tujuan Renstra : Meningkatnya Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian. Indikator : 1. Persentase Koperasi Sehat 2. Persentase Peningkatan PDRB sector Usaha Mikro
MISI 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.	SASARAN : (menjadi Kinerja Utama) 1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Indikator : a. Persentase Koperasi Aktif b. Persentase Koperasi dengan permodalan mandiri
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.	2. Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro Indikator : a. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil b. Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru menjadi Usaha Mikro
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian.	

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Matriks RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	82%	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	82%	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	30 orang	94.192.000
	Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	81%					Aplikasi koperasi berbasis IT	1 aplikasi	
							Jumlah peserta lomba kompetensi perkoperasian	30 orang	
							Jumlah peserta jambore koperasi	14 orang	
							Jumlah koperasi yang difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah	2 koperasi	
							Jumlah data dan informasi koperasi yang tersusun	1 dokume n	
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan				30 koperasi	219.250.000		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
91							Jumlah data monev usaha koperasi yang tersusun	1 dokumen	
						Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan koperasi	80 orang	83.971.800
							Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi	80 orang	
							Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi yang tersusun	1 dokumen	
							Jumlah dokumen monev koperasi yang tersusun	1 dokumen	
						Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Jumlah Pelatihan bagi koperasi	4 pelatihan	491.010.000
							Jumlah Pelatihan bagi Usaha Mikro	3 pelatihan	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2 koperasi	11.629.000
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,7%	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dengan Peningkatan Volume Usaha	1,7%	Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan	80 UM	98.474.600
		Jumlah UM yang difasilitasi sarana prasarana					80 UM		
	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pasca pelatihan	2 UM							
	Jumlah dokumen monev pelatihan tahun lalu	1 dokumen							
	Jumlah pedoman dan standarisasi yang tersusun	1 dokumen							
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,5%				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti pameran	50 UM	156.941.500
							Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat utk bekerjasama	5 orang	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah data dan informasi UM yang tersusun	1 dokumen	87.057.800
							Jumlah UM yang terfasilitasi penyelesaian masalah	5 UM	
						Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dana bergulir	25 UM	11.997.900
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	Persentase Usaha Mikro yang terbina	1,5%	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dibidang usaha mikro	Jumlah pelatihan bagi usaha mikro	3 macam	142.138.200
						Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah promosi bagi usaha mikro	5 promosi	74.413.300

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Implementasi penjabaran rencana strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja ini merupakan penguatan dari Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja beserta targetnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar pada awal tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	82 % 81 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	- Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil - Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,7 % 1,5 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	899.995.700	DAU dan DAK Non Fisik PK2UKM
2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	354.471.800	DAU
3	Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	216.551.500	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Spesifik Grant)
4	Pelayanan Perkantoran	592.2853.100	DAU, Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop. Jatim dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	72.448.800	PAD dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.800.000	DAU
	Jumlah Dana	2.142.120.900	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 Oktober 2020 diadakan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar sebagai berikut:

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	82 % 81 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	- Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil - Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,7 % 1,5 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	712.257.800	DAU dan DAK Non Fisik PK2UKM
2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	246.266.900	DAU
3	Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	203.010.100	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Spesifik Grant)
4	Pelayanan Perkantoran	610.229.400	DAU, Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop. Jatim dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	49.049.200	PAD dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.800.000	DAU
	Jumlah Dana	1.826.613.400	

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun
						2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kontribusi Usaha Mikro terhadap perekonomian	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	$(\text{Jumlah Koperasi Aktif} / \text{Jumlah Koperasi seluruhnya}) \times 100\%$	82%
				Persentase Koperasi dengan permodalan mandiri	$(\text{Jumlah Koperasi dengan permodalan mandiri} / \text{Jumlah Koperasi seluruhnya}) \times 100\%$	81%
		Persentase peningkatan PDRB sector Usaha Mikro	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan UM menjadi UK	$\{(\text{Jumlah UM menjadi UK th n} - \text{Jumlah UM yang menjadi UK th n-1} / \text{Jumlah UM yang menjadi UK th n-1})\} \times 100\%$	1,7 %
				Persentase Pertumbuhan WUB menjadi UM	$\{(\text{Jumlah WUB yang menjadi UM th n} - \text{Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1} / \text{Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1})\} \times 100\%$	1,5 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Good governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar, tidak terlepas pula dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat

standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus tingkat realisasi positif sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif = CAPAIAN	=	Realisasi	X 100 %
		Target	

2. Tingkat Realisasi Negatif =CAPAIAN	=	(2xTarget-Realisasi)	X 100 %
		Target	

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Th. 2020	REALISASI Th. 2020	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	82 %	87,41 %	106,6
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	81 %	86,7 %	107,04
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,7 %	0,09 %	5,29
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,5 %	3,24%	216,00

ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	% CAPAIAN	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	106,6	√			
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	107,04	√			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran			106,82	Sangat Berhasil			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	5,29				√
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	216,00	√			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran			110,65	Sangat Berhasil			

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Analisis atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar pada tahun 2020 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Koperasi dan UM guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas mempunyai 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	%
Persentase Koperasi Aktif	82 %	87,41 %	106,6

Keterangan :

- Koperasi Aktif adalah koperasi yang memiliki skor $\geq 66,00$ untuk penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva, produksi aktif, manajemen, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi serta melaksanakan RAT dan bersertifikat NIK.
- Jumlah Koperasi Aktif tahun 2020 sebanyak 243 koperasi dari total koperasi seluruhnya sejumlah 278 Koperasi
- Jumlah Koperasi Aktif ditargetkan sebesar 82 % atau sekitar 228 Koperasi aktif dari total koperasi sejumlah 278 Koperasi. Rincian realisasi kinerja adalah Jumlah Koperasi aktif (243 koperasi) dibagi Jumlah Koperasi seluruhnya (278 koperasi) dikali 100%. Dengan Realisasi Kinerja sebesar 87,41 % dibanding dengan target 82 % dengan capaian kinerja sebesar 106,6 %, maka dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.
- Jumlah koperasi seluruhnya menjadi 278 karena disetujuinya usulan pembubaran sebanyak 62 koperasi.
- Faktor Keberhasilan dari pendukung indicator ini adalah :
Tingkat kehadiran peserta pelatihan/bimtek/sosialisasi sangat bagus dan peserta sangat semangat utk mengikuti materi yg diberikan narasumber
- Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Materi yg diterima belum sepenuhnya diimplementasikan dan dari jumlah koperasi serta anggota koperasi belum semuanya bisa memanfaatkan pelatihan yg diadakan
- Tindak lanjut yang diperlukan pada tahun yang akan datang : Perlunya motivasi

kpd peserta pelatihan akan manfaat dan pentingnya pelatihan dan perlu adanya tambahan anggaran sehingga bisa menjangkau semua koperasi dan anggota koperasi

2. Indikator Kinerja Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	%
Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	81 %	86,70 %	107,04

Keterangan :

- Definisi koperasi dengan Permodalan Mandiri adalah koperasi yang memiliki modal ≥ 60 % milik sendiri
- Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri tahun 2020 sebanyak 241 koperasi dari total koperasi seluruhnya sejumlah 278 Koperasi
- Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri ditargetkan sebesar 81 % atau sekitar 225 Koperasi dari total koperasi sejumlah 278 Koperasi. Rincian realisasi kinerja adalah Jumlah Koperasi dengan Permodalan Mandiri (241 koperasi) dibagi Jumlah Koperasi seluruhnya (278 koperasi) dikali 100%. Dengan Capaian Kinerja sebesar 86,7 % dibanding dengan target hal ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini dari 278 koperasi yang ada hanya 37 koperasi yang mempunyai hutang jangka panjang, selebihnya sejumlah 241 mempunyai hutang jangka pendek (modal milik anggota sendiri).

**Perkembangan Data Koperasi Di Kota Blitar
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah koperasi	Unit	340	278
	- Koperasi Aktif	Unit	274	243
	- Koperasi Tidak Aktif	Unit	66	35
2	Koperasi Bersertifikat NIK	Unit	131	135
3	Koperasi dengan Permodalan mandiri	Unit	303	241
4	Usulan Pembubaran Koperasi	Unit	62	-
5	Anggota	Org/Kop	26.002	24.542
6	RAT	Koperasi	107	99
7	Manager	Org	101	53
8	Karyawan	Org	517	563
9	Modal Sendiri	Rp	117.977.378	121.805.512
10	Modal Luar	Rp	96.980.773	93.388.877
11	Total Aset	Rp	208.213.797	213.995.457
12	Volume Usaha	Rp	255.568.442	238.005.065
13	SHU	Rp	8.993.879	9.016.292

Sumber :Dinas Koperasi dan UM, Desember 2020

Keterangan : Jumlah koperasi berkurang karena disetujuinya usulan pembubaran sebanyak 62 koperasi.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro mempunyai 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	%
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,7 %	0,09 %	5,29

Keterangan :

- Jumlah Usaha Mikro tahun 2020 sebanyak 12.437 dan jumlah Usaha kecil Tahun 2020 sebanyak 810.
- Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil ditargetkan sebesar 1,7 %, pada indikator ini dapat dikatakan tidak berhasil mencapai target karena kondisi pandemi yang berdampak pada omset usaha para pelaku usaha mikro, maka di tahun 2021 diharapkan dengan perbaikan pencapaian target menjadi 1,72% .

2. Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro dengan uraian :

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,5 %	3,24 %	216,00

Keterangan :

- Jumlah Wirausaha Baru tahun 2020 sebanyak 1.315 dan jumlah Usaha Mikro Tahun 2020 sebanyak 12.437.
- Jumlah Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro ditargetkan sebesar 1,5 % dengan Realisasi Kinerja ini sebesar 3,24 %, dalam arti sangat berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena pada tahun 2020 masa pandemi banyak masyarakat yang membuka usaha baru khususnya korban PHK, pelaku usaha jasa, kerajinan yang beralih ke makanan dan minuman, dll.

- Faktor pendukung keberhasilan kinerja : telah terbentuknya Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar, terciptanya kerjasama antara pelaku usaha mikro yg dibuktikan dgn seringnya pertemuan, luasnya jangkauan pasar usaha mikro melalui pemasaran online, Minat dan kemauan dari pelaku usaha mikro sangat besar
- Faktor penghambat pencapaian kinerja : terbatasnya permodalan, kemampuan manajemen usaha dan akses teknologi informasi bagi pelaku UM, Partisipasi pelaku usaha mikro untuk ikut pelatihan agak susah karena kebanyakan pelaku usaha rumahan
- Tindak lanjut yang diperlukan pada tahun yang akan datang : adanya bantuan hibah permodalan dan pelatihan manajemen usaha bagi UM, Pendampingan dan mengikutkan pelatihan lagi pada pelatihan lanjutan bagi peserta yg benar-benar berminat dan ada kelanjutan dari hasil pelatihan terdahulu

Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Th 2019	REALISASI Th. 2019	Target Th 2020	REALISASI Th. 2020
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	80%	80,58%	82%	87,41%
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	80%	89,13%	81%	86,7%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,6%	1,67%	1,7%	0,09%
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1%	3,75%	1,5	3,24%

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Akhir RPJMD/Renstra	REALISASI s.d Th. 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	85 %	87,41%	102,84%
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	82 %	86,7%	105,73%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,72 %	0.09%	5,23%
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	2 %	3,24%	162 %

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI s.d Th. 2020	REALISASI Nasional	Ket
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	87,41 %	-	-
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	86,7 %	-	-
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,09 %	-	-
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	3,24 %	-	-

**Anggaran Per Sasaran Pembangunan
Tahun 2020**

No.	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Perkantoran	610.229.400	33,41
II	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	49.049.200	2,69
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.800.000	0,32
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	246.266.900	13,48
V	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro)	203.010.100	11,11
VI	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	712.257.800	38,99
	J U M L A H	1.826.613.400	

**Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Pembangunan
Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Perkantoran	610.229.400	594.995.801	97,50
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	66.852.500	66.401.900	99,33
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	128.575.000	128.569.860	100,00
3	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	407.201.900	392.424.041	96,37
4	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	5.250.000	5.250.000	100,00
5	Penyusunan Laporan Keuangan	2.350.000	2.350.000	100,00
II	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	49.049.200	49.014.000	99,93
1	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	37.580.000	37.580.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	11.469.200	11.434.000	99,69
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.800.000	5.800.000	100,00
1	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.800.000	5.800.000	100,00
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	246.266.900	245.640.700	99,75
1	Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro	95.751.100	95.151.100	99,37
2	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro	57.660.100	57.635.000	99,96
3	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	80.857.800	80.856.700	100,00
4	Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir UM	11.997.900	11.997.900	100,00
V	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Usaha Mikro)	203.010.100	202.065.753	99,53
1	Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang usaha mikro	128.596.800	128.587.453	99,99
2	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat (Bidang UM)	74.413.300	73.478.300	98,74
VI	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	712.257.800	710.698.500	99,78
1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	97.024.900	96.934.900	99,91
2	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi	38.622.100	38.622.100	100,00
3	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	73.971.800	73.971.800	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil	491.010.000	489.540.700	99,70

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	dan Menengah			
5	Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi	11.629.000	11.629.000	100,00
	J U M L A H	1.826.613.400	1.808.214.754	98,99

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kota Blitar, 2020

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	82%	87,41%	106,6	712.257.800	710.698.500	99,78
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	81%	86,7 %	107,04			
Rata-Rata Capaian Kinerja					106,82			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,7%	0,09 %	5,29	449.277.000	447.706.453	99,65
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,5 %	3,24 %	216,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja					110,65			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa efiseiensi penggunaan anggaran atas kinerja sebagai berikut:

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran / Program	Indikator	Rata –Rata % Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	106,82	99,78 %	1,07
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	110,65	99,65 %	1,11
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro			
	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	97,50 %	1,03
	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda Kota Blitar	100 %	99,93 %	1
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	100 %	1

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dapat merealisasikan keluaran kegiatan rata-rata sebesar 98,99 % yang meliputi 6 (enam) program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan.

Capaian kinerja dari penyelenggaraan urusan Koperasi dan UM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro dan Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang usaha mikro. Kegiatan ini berupa pelatihan yang sasarannya pelaku usaha mikro, dan selama tahun 2020 telah dilaksanakan 5 jenis pelatihan (Kue Kering, Rajut Benang, Desain Baju, Kemasan dan Digital Marketing) yang diikuti sebanyak 175 orang pelaku usaha mikro dengan tujuan meningkatkan kemampuan usaha dan mendorong terciptanya usaha baru.

Sedangkan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro dan Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat (Bidang UM) berupa pendampingan dalam pameran, Workshop Pemasaran Online kepada 150 pelaku Usaha Mikro, Kegiatan Kurasi Produk Usaha Mikro yang diikuti oleh 50 orang, Penguatan Promosi melalui Inovasi Produk sejumlah 50 pelaku Um serta fasilitasi berupa leaflet maupun talk show melalui radio.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro dilaksanakan pendataan pelaku usaha mikro untuk disesuaikan dengan kondisi terkini di 21 kelurahan sehingga diketahui pemetaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Blitar .

2. Program Pembinaan dan Pengembangan koperasi diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi berupa Bimtek pelaksanaan RAT kepada 80

orang pengurus koperasi guna mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT setiap tahunnya.

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi berupa kegiatan Motivasi kepada koperasi terdampak Covid-19 kepada 75 orang pengurus dengan tujuan memberikan motivasi bagi koperasi dalam menghadapi pandemi.

Monitoring dan Evaluasi perkembangan koperasi berupa Bimtek Analisa Laporan Keuangan dan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan yang diikuti oleh 80 orang dengan tujuan agar pengurus koperasi mampu menyusun laporan keuangan sendiri dan pengawas koperasi mampu menganalisa laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus koperasi.

Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, telah dilakukan pelatihan manajemen pemasaran, administrasi keuangan, kerajinan bathok, pelatihan kuliner, pelatihan koperasi bagi pemuda dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis IT.

Pada dasarnya pelaksanaan urusan bidang koperasi dan usaha mikro selama tahun 2020 sudah berjalan baik, namun secara khusus dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain :

- 1) Belum maksimalnya kesadaran koperasi dalam hal kedisiplinan pemenuhan kewajiban, penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dimana masih mencapai 40,74 persen dari Koperasi yang aktif.

Untuk menangani permasalahan ini Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar masih terus berupaya menumbuhkan kesadaran pada para pengurus, pengawas, anggota dan karyawan koperasi melalui pendampingan dan bimbingan teknis pemahaman perkoperasian pada para pengurus dan pengawas yang baru re-organisasi, melakukan sosialisasi para anggota dan karyawan koperasi mengenai organisasi, manajerial, usaha serta permodalan. Disamping itu

Dinas Koperasi dan UM juga memberikan surat edaran mengenai pelaksanaan RAT tahunan kepada semua gerakan Koperasi di Kota Blitar.

- 2) Pandemi tahun 2020 berdampak terhadap penurunan omset usaha pelaku usaha mikro, hal ini diakibatkan berkurangnya jam operasional usaha, penunggakan hutang, serta kendala distribusi. Karena itulah, Sebagian pelaku usaha mengambil Langkah cepat agar tidak terlalu mengalami keterpurukan dalam sektor ekonomi. Untuk bertahan di tengah pandemi, para pelaku usaha menerapkan beberapa strategi. Dari hasil survey didapatkan bahwasannya sebanyak 49 persen para pelaku usaha menjaga hubungan baik dengan konsumen untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya. Adapun strategi lain yang diterapkan meliputi mengatur keuangan dan membuat skala prioritas keuangan, mengubah cara berjualan dari *offline* menjadi *online*, inovasi (produk, pemasaran, model bisnis, dan lainnya), memperbaiki kualitas produksi, membaca literatur dan berita mengenai perilaku konsumen, dan sisanya masih belum memiliki strategi. Disamping itu pemerintah juga membantu dan memberikan dukungan kepada pelaku UMKM antara lain bantuan berupa bingkisan bahan pokok kepada pelaku usaha mikro terdampak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj IP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar tahun 2020 termasuk kategori nilai capaian kinerja ***Sangat Berhasil*** walaupun masih dijumpai ada beberapa kendala / hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

1. Belum terlaksananya Diklat Perkoperasian dan aplikasi terbaru dalam pelaksanaan administrasi koperasi.
2. Adanya pengertian yang berkembang pada pelaku usaha mikro bahwa bila meningkat menjadi usaha kecil , kewenangan pembinaan ada di Propinsi tidak di kota/kabupaten.
3. Koperasi kurang diminati oleh masyarakat terutama kaum milenial.

B. Saran Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Perlu adanya Diklat dan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan administrasi koperasi;
- b. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan Koperasi untuk peningkatan kualitas

- usaha koperasi untuk mendukung kontribusi terhadap pendapatan Kota Blitar
- c. Perlu adanya rutinitas untuk pendampingan guna peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi yang diwujudkan dengan peningkatan persentase koperasi aktif yang sehat;
 - d. Perlu adanya pendampingan terhadap usaha mikro oleh suatu lembaga dalam penguatan produk.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar Tahun 2020 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, Pebruari 2021
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM
KOTA BLITAR

SAD SASMINTARTI, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660119 198602 2 002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2021**

VISI : Masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

MISI : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL					TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL					TARGET					KEBIJAKAN	PROGRAM
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017				2018	2019	2020	2021								
Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro terhadap Perekonomian	Persentase peningkatan PDRB sektor Usaha Mikro	(Nilai PDRB sektor UM Th n - Nilai PDRB sektor UM Th n-1) / Nilai PDRB sektor UM Th n-1 x 100%	3,685 (tr rupiah)	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	43%	45%	48%	73%	80%	82%	85%	Pembinaan dan Pendampingan Koperasi	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi					
											Persentase Koperasi dengan permodalan mandiri / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%					NA	75%	80%	81%	82%							
											Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	((Jumlah UM menjadi UK th n – Jumlah UM yang menjadi UK th n-1 / Jumlah UM yang menjadi UK th n-1)) x 100%				NA	1,5%	1,7%	1,7%	1,72%	Pembinaan dan Pendampingan UM	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro				
											Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	((Jumlah WUB yang menjadi UM th n – Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1 / Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1)) x 100%				NA	0,5%	1,5%	1,5%	2%							
																							Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)				

PIK KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BLITAR



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAD SASMINTARTI, SH. MM.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Blitar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. JUMADI, M.MT.

Jabatan : Pjs. Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pjs. WALIKOTA BLITAR

Dr. Ir. JUMADI, M.MT.

Blitar, 23 Oktober 2020
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO

SAD SASMINTARTI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660119 198602 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR**

No	Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	82 % 81 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	- Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil - Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,7 % 1,5 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	712.257.800	DAU dan DAK Non Fisik PK2UKM
2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	246.266.900	DAU
3	Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	203.010.100	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Spesifik Grant)
4	Pelayanan Perkantoran	610.229.400	DAU, Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop. Jatim dan DID
5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	49.049.200	DAU dan DID
6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.800.000	DID
	Jumlah Dana	1.826.613.400	

Pjs. WALIKOTA BLITAR



Dr. Ir. JUMADI, M.MT.

Blitar, 23 Oktober 2020
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO



SAD SASMINTARTI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660119 198602 2 002

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatkan Kualitas Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	82% 81%	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase Koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi	82%	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian	30 orang	97.024.900
							Aplikasi koperasi berbasis IT	1 aplikasi	
							Jumlah peserta lomba kompetensi koperasi	30 peserta	
							Jumlah peserta jambore/galaksi koperasi	14 orang	
							Jumlah koperasi yang difasilitasi pendirian dan penyelesaian masalah	2 koperasi	
							Jumlah data dan informasi koperasi yang tersusun	1 dokumen	
							Jumlah koperasi yang mengikuti promosi produk unggulan	30 koperasi	38.622.100
			Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama				Jumlah data money usaha koperasi yang tersusun	1 dokumen	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi	Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan koperasi	80 peserta	73.971.800
							Jumlah peserta bimtek pengawasan koperasi	80 peserta	
							Jumlah dokumen money perkembangan koperasi yang tersusun	1 dokumen	
							Jumlah dokumen pendampingan akuntabilitas dan pengawasan koperasi	1 dokumen	
						Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah pelatihan bagi koperasi	4 pelatihan	491.010.000
							Jumlah pelatihan bagi usaha mikro	3 pelatihan	
							Jumlah koperasi yang difasilitasi dana bergulir	2 koperasi	11.629.000
						Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan	80 UM	95.751.100
							Jumlah UM yang difasilitasi sarana prasarana	80 UM	
						Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro			
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	1,7%	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dengan Peningkatan Volume Usaha	1,7%				

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	1,5%					Jumlah dokumen money pelatihan tahun lalu	1 dokumen	
							Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pasca pelatihan	2 UM	
							Jumlah pedoman dan standarisasi yg tersusun	1 dokumen	
						Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro	Jumlah UM yang mengikuti pameran	50 UM	57.660.100
							Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat utk bekerjasama	5 orang	
						Monitoring dan Evaluasi Perkembangan	Jumlah data dan informasi UM yang tersusun	1 dokumen	80.857.800
							Jumlah UM yang terfasilitasi penyelesaian masalah	5 UM	
						Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dana bergulir	25 UM	11.997.900

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	Persentase Usaha Mikro yang terbina	1,5%	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Bidang Usaha	Jumlah pelatihan bagi usaha mikro	3 macam	128.596.800
						Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah promosi bagi usaha mikro	5 promosi	74.413.300

Bitar, 10 Oktober 2020

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



SAD SASMINTARTI, SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660119 198602 2 002

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BLITAR
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET.
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	(Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	82%	87,41%	106,60		Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Rp 712.257.800	Rp 710.689.500	99,78	
		Persentase Koperasi dengan Permodalan Mandiri	(Jumlah Koperasi dengan permodalan mandiri / Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%	81%	86,70%	107,04						
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	{(Jumlah UM menjadi UK th n – Jumlah UM yang menjadi UK th n-1 / Jumlah UM yang menjadi UK th n-1)} x 100%	1,7%	0,09%	5,29		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 246.266.900	Rp 245.640.700	99,75	
		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru menjadi Usaha Mikro	{(Jumlah WUB yang menjadi UM th n – Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1 / Jumlah WUB yang menjadi UM th n-1)} x 100%	1,5%	3,24%	216,00		Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)	Rp 203.010.100	Rp 202.065.753	99,53	

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA BLITAR



SAB SASMINTARTI, SH. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660119 198602 2 002